



Survei Transparency International Indonesia (TII): **Jogja, Kota Terbersih dari Korupsi**

JAKARTA -- Kota Jogja mengukir prestasi. Jogja dinyatakan sebagai kota terbersih dari perilaku korupsi. Pelaku bisnis di kota tersebut percaya bahwa pemerintah setempat serius dalam memberantas korupsi.

Hal ini terungkap dalam jumpa pers yang diadakan Transparency International Indonesia (TII) mengenai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2008 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (21/1).

Survei kuantitatif ini dilakukan mulai September-Desember 2008. Survei dilakukan di 50 kota yang terdiri dari 33-ibu kota provinsi ditambah 17 kota besar.

Metode yang dilakukan dengan

wawancara tatap muka. Dan responden yang diambil berasal dari pelaku bisnis 60 persen, pejabat publik 30 persen, dan tokoh masyarakat 10 persen.

Berdasarkan penilaian TII, Jogja mendapat jumlah 6,43 dari 44 responden. Dilanjutkan dengan Palangkaraya dengan nilai 6,1.

Kota lainnya, Banda Aceh (5,87), Jambi (5,57) dan Mataram (5,1). Bagaimana dengan Jakarta, Ibu kota Indonesia ini menempati urutan 20 besar dengan nilai 4,06. Dan paling buncit sekaligus kota terkorup ditasbihkan ke Kota Kupang.

Menurut Manajer Riset dan Kebijakan TII Frenky Simanjuntak, Jogja

terpilih karena sejak tahun 2006 daerah ini telah menerapkan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap. Sedangkan Kupang menjadi kota terkorup karena banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan anggota DPRD setempat.

Terkait survei itu Walikota Jogja, Herry Zudianto, semalam kepada *Bernas Jogja* mengatakan belum tahu persis atas survei TII itu. "Tapi saya apresiasi betul dan syukur *Alhamdulillah* jika itu memang benar adanya," jelasnya.

Menurut Herry, selama ini pihaknya beserta jajaran di Pemkot selalu mem-

>> KE HAL 6

Jogja, Kota Terbersih dari Korupsi

Sambungan dari hal. 1

gang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, responsifitas di dalam seluruh kebijakannya.

Polisi sering disuap

TII juga menyebut hasil survei menyebutkan Polri menjadi institusi yang paling sering terjadi parktek suap-menyuap. Sedangkan lembaga peradilan di Indonesia menjadi lembaga yang paling banyak menerima uang suap.

Frenky mengatakan indeks ini untuk mengukur sejauh mana interaksi antara pelaku bisnis dengan institusi politik yang terjadi suap dibandingkan total kontrak.

Dari 1218 pelaku bisnis yang diwawancari, 48 pesen mengaku terjadi interaksi suap. "Hampir setengahnya melibatkan interaksi suap," kata Frenky.

Jika dijumlah, rata-rata penerimaan suap di kepolisian se-

besar Rp 2,27 juta. Di tempat kedua ditempati oleh Bea Cukai.

Dari 423 jumlah responden, 41 persen nya mengaku pernah dimintai uang suap. Total jumlah penerimaan uang suap di lembaga ini mencapai Rp 3,27 juta.

Kemudian berturut-turut adalah kantor Imigrasi, DLLAJR, Pemda Kota, Pertanahan Nasional dan Perlindo. Yang menarik adalah lembaga peradilan. Meski dari 204 responden hanya 30 persen yang mengaku pernah diminta suap, namun total penerimaan uangnya sangat fantastis, sebesar Rp 102,4 juta. "Angka ini cukup spektakuler," ujar Frenky.

Dari 3.841 responden meliputi pelaku bisnis 2.371 responden, tokoh masyarakat 396 responden dan pejabat publik 1.074 responden, semua ingin supaya institusi hukum menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi. (dte/hjl)

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dharma Wanita Persatuan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005